



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KUNCORO HARTO WIDODO  
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN, ASET, SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI  
3. NHK : 739779

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.630.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 817 m2/240 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.260.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 712 m2/500 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 2.520.000.000  
3. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 550.000.000  
4. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 933.500.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000  
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000  
3. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000  
4. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000  
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 585.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.313.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.876.500.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.876.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.